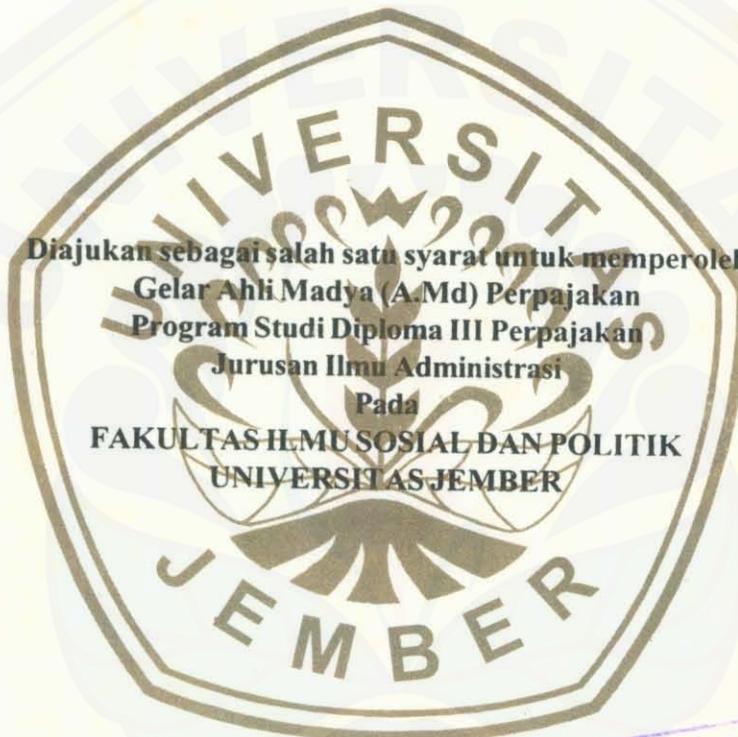


**PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Oleh :

Nur Anifiyah

NIM. 980903101001

Dosen Pembimbing :

Drs. H. BOEDIJONO, MSi

NIP. 131 832 304

Asal	: Hadiah	Klas 320 237 ARI P
Terima Tgl:	: 5/6/01.	
No. Induk :	: 10235893.	

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : NUR ARIFIYAH
NIM : 980903101001
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
Di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Cabang Situbondo

Jember, 11 Mei 2001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs.H. BOEDIJONO,MSi

NIP. 131 832 304

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik:

Nama : NUR ARIFIYAH
NIM : 980903101001
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Mei 2001
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota



Drs. Totok Supriyanto
NIP. 130 605 111

Ketua



Drs. Boedijono, MSi
NIP. 131 832 304

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. Moch Toerki
NIP. 130 524 832

MOTTO

“ Biasakanlah bersikap jujur sekalipun didepan anda terlihat bahaya, sebab itu bukan bahaya tetapi bahagia. Jauhilah kebohongan sekalipun didepan anda terlihat bahagia, sebab itu bukan bahagia melainkan bahaya”.

(Nabi Muhammad, SAW)

“ Orang yang cuma berfikir untuk kepentingan perutnya maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya”.

(Ali Bin Abu Thalib)

“ Mengakui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita. Berusaha terus mengisi kekurangan adalah keberanian luar biasa”.

(Dr. Hamka)

“ Didunia ini tak ada barang sesuatu pun yang pasti, kecuali mati dan pajak-pajak”.

(Benyamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Bapak Drs.H.Sudarmo dan Alm. Ibu Hj.Mustafiyah Tersayang

Semoga keberhasilanku ini memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan dan do'anya.

Kakak-kakakku Tersayang (Anton, Opex, Yayan, Nunung, Nurul Jamilah, Mas Safiyono, Mas Amir)

Semoga keakraban dan kasih sayang yang ada diantara kita tetap abadi salamanya.

Adik-adikku dan Keponakanku Tercinta (Andri, Dyas, Iva, Cipie, Vindy, Aik)

Keceriaan dan kemanjaanmu memberikan hiburan tersendiri dalam hatiku.

Seluruh Keluarga di Arjasa (Bapak Harik Mulyono, Ibu Hasanah, Ibu Aminah, Ibu Nanung, Om Papa, Mak)

Kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan sangat berarti bagiku.

Sahabat-sahabatku tercinta (Putri, Mbak Evi, Ira, Badrus)

Kebersamaan dan cinta kasih semoga tetap abadi selamanya

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagai syarat penyelesaian studi di DIII Perpajakan.

Penulis banyak menghadapi kendala dalam proses penyusunan laporan ini. Namun semua itu dapat diatasi berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan serta saran yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Drs.H.Moch.Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Bapak Drs.Agus Budiharjo,MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
- 3) Bapak Drs.Sasongko,MSi selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan.
- 4) Bapak Drs. H. Boedijono,MSi selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berguna dalam penyusunan laporan ini.
- 5) Bapak Drs.Sutrisno,Msi selaku dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama ini.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi masa depan kami.
- 7) Bapak Djati Waluyo,BAc selaku Kepala Bagian Administrasi di PT.PLN (Persero) Disrtibusi Jawa Timur Cabang Situbondo atas segala bantuannya selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- 8) Bapak Faissal selaku Kepala Seksi Kepegawaian di PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo atas segala bimbingan dan perhatiannya.

- 9) Bapak Astar Amat Mila selaku Kepala Seksi Keuangan dan Anggaran di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo atas segala bantuannya.
- 10) Bapak Kusnadi selaku Kepala Seksi Akuntansi, Bapak Kuslantianto, Ibu Siti Ana, Bapak Ahmad Sobir, Bapak Agus Suwandi, Bapak Joko, Bapak Zainal Arifin selaku karyawan di bagian Keuangan atas segala perhatian dan dukungannya.
- 11) Seluruh karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cabang Situbondo atas segala bantuannya.
- 12) Rekan-rekan DIII Perpajakan kelas A atas kebersamaannya selama ini.
- 13) Saudara-saudaraku di Jawa VI 2B (Iyo, Lina, Vera, Mbak Ita, Mbak Bayu, Tina, Nurul, Jemmy, Yuni, Anik, Mia, Mbak Titik, Denok, Lukita) atas kasih sayang, motivasi dan perhatiannya.

Semoga segala yang diberikan dan dicurahkan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami sangat mewngharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, April 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.2.1 Tujuan.....	3
1.2.2 Kegunaan.....	3
Bab II Gambaran Umum Perusahaan	
2.1 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)	5
2.2 Struktur Organisasi PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	9
2.2.1 Struktur Organisasi.....	9
2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab....	11
2.3 Personalia Perusahaan.....	19
2.3.1 Jam Kerja.....	19
2.3.2 Jumlah Pegawai	19

2.4 Kegiatan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	21
Bab III Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.1.1 Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri	26
3.1.2 Pajak Pertambahan Nilai Atas Rekening Tarif R-3	30
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo Dalam Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai.....	43
Bab IV Penutup.....	45
Daftar Pustaka.....	47
Daftar Lampiran.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Jam kerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	19
2. Komposisi Jumlah Pegawai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.....	20
3. Kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo	25
4. Tarif Dasar Listrik Tahun 2000.....	31
5. Biaya Beban berdasarkan Tarif Dasar Listrik Tahun 2000	34
6. Biaya Pemakaian berdasarkan Tarif Dasar Listrik Tahun 2000	36
7. Biaya Keterlambatan berdasarkan Tarif Dasar Listrik Tahun 2000.....	42
8. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri.....	43
9. Pajak Pertambahan Nilai Atas Rekening Tarif R-3.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1: Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo	10



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kurikulum yang ada, mahasiswa DIII Perpajakan diwajibkan mengikuti program Praktek Kerja Nyata di suatu perusahaan baik itu Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. Dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kabupaten Situbondo, yang menjadi pilihan penulis adalah PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang telah terdaftar sebagai wajib Pajak dan telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1-001-629-3-627.

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo:

1) Listrik merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi masyarakat Indonesia termasuk didalamnya masyarakat Situbondo.

Kebutuhan manusia yang kita ketahui ada 3 macam,yaitu:

- (a) Kebutuhan Primer
- (b) Kebutuhan Sekunder
- (c) Kebutuhan Tersier

Namun dengan adanya perkembangan teknologi, pendidikan, pendapatan masyarakat saat ini terjadi perkembangan atau perubahan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Semula kebutuhan primer yang hanya terbatas pada kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan kini mulai berkembang dengan beralihnya kedudukan suatu kebutuhan yang pada awalnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier bagi kehidupan rumah tangga berubah menjadi kebutuhan primer atau pokok. Salah satu contoh dari kebutuhan yang dimaksud adalah listrik.

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk membantu kelancaran pekerjaan rumah tangga dan

kelancaran proses produksi disuatu badan usaha. Dahulu listrik merupakan kebutuhan sekunder bahkan mungkin tersier bagi sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena listrik masih dapat diganti dengan prasarana lain misalnya lampu minyak tanah untuk mendapat cahaya penerangan. Disamping itu mungkin karena rumitnya distribusi listrik sehingga mengakibatkan mahalnya biaya pendistribusian listrik kepada masyarakat dan hanya dapat dijangkau golongan tertentu.

Teknologi yang semakin canggih serta pendapatan masyarakat yang meningkat lebih mempermudah pendistribusian listrik dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat walaupun masih ada sebagian kecil dari mereka yang masih menggunakan tradisi lama yaitu lampu minyak tanah.

- 2) Adanya rasa ingin tahu secara ilmiah tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Pada hakekatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi sendiri segala kebutuhannya tanpa adanya bantuan atau interaksi dengan orang lain. Demikian halnya dalam pemenuhan kebutuhan akan listrik. Pengadaan listrik di Kabupaten Situbondo dikelola oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Dalam lingkungan kerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo banyak sekali kegiatan yang perlu diketahui, antara lain:

- (a) Kegiatan pelayanan sambungan baru
- (b) Kegiatan pelayan atas perubahan daya
- (c) Kegiatan penghitungan rekening listrik beserta pajaknya
- (d) Kegiatan pemberian informasi
- (e) Pengenaan biaya keterlambatan bagi pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik.

Kegiatan-kegiatan tersebut ditangani oleh petugas yang benar-benar ahli dibidangnya karena PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo ingin memberikan pelayan yang terbaik bagi para pelanggannya.

- 3) Adanya keinginan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir yaitu "Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo".

- 4) Karena letak PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo sangat strategis dan mudah dijangkau.

1.2 Tujuan Dan Kegunaan

Program Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 bulan mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan.

1.2.1 Tujuan

Tujuan Umum:

- (a) Ingin mengetahui cara penghitungan rekening listrik sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (b) Ingin mengetahui langkah-langkah yang dilakukan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dalam mengatasi para pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik.
- (c) Ingin mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Tujuan Khusus:

Ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan Secara Umum:

Memperoleh tambahan pengalaman dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Kegunaan Secara Khusus:

- (a) Memenuhi syarat penyelesaian studi di Diploma III Perpajakan.
- (b) Membandingkan antara teori dengan praktek yang ada di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.



BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)

Sejarah kelistrikan di Indonesia sejak tahun 1898 zaman pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan pengelolaannya dilakukan Pemerintah Hindia Belanda dengan Perusahaan Listrik Swasta. Berdasarkan kurun waktunya, perkembangan Perusahaan Listrik Negara dibagi menjadi 5 periode:

1) Periode sampai tahun 1943 (Perusahaan Listrik Negara)

Setelah Perusahaan Listrik yang berpusat di Negeri Belanda didirikan di wilayah Indonesia, pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti *Elektriciteit Bedriff Batavia* (1893), *Elektriciteit Bedriff Medan* (1903), *Elektriciteit Bedriff Surabaya* (1907) dialihkan ke Perusahaan Swasta, Pendirian Perusahaan Listrik Belanda di Indonesia antara lain:

- (a) Tahun 1913, Perusahaan Listrik NV. NIGM (kemudian menjadi NV. OGEM), wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meesterornelis (Jatinegara), Tangerang, Cirebon, Kebayoran Lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang), dan Manado.
- (b) Tahun 1914, Perusahaan Listrik NV. ANIEM, wilayah operasi meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukit Tinggi, Pontianak, dan Ambon.
- (c) Tahun 1915, Perusahaan Listrik ELECTRA, wilayah operasi meliputi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
- (d) Tahun 1923/1928, Perusahaan Listrik NV. GEBEO, daerah operasi meliputi Bandung, Bogor serta kota se-Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.

- (e) Tahun 1925, Perusahaan Listrik OJEM, daerah operasi Panarukan.
 - (f) Tahun 1927, Perusahaan Listrik EMR, daerah operasi Rembang dan Bojonegoro.
 - (g) Tahun 1939, Perusahaan Listrik EMB, daerah operasi Banyumas.
- 2) Periode 1943-1945 (Perusahaan Listrik Zaman Jepang)

Masa ini Perusahaan Listrik Swasta milik Belanda di Indonesia dikuasai Jepang dan Perusahaan Listrik Swasta yang ada di pulau Jawa oleh Angkatan Darat Jepang diganti sebagai:

- (a) Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
 - (b) Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
 - (c) Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
 - (d) Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur
- 3) Periode 1945 -1950 (setelah proklamasi kemerdekaan /masa revolusi)

Selama periode ini, pengelolaan Perusahaan Listrik dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas di daerah yang dikuasai Pemerintah Indonesia. Pengambilalihan pimpinan Kesatuan Aktif Karyawan Listrik terjadi pada tanggal 21 September 1945, kemudian meluas ke Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan di luar Jawa. Pengambilalihan pimpinan Perusahaan Listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga) di Jakarta. Tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1945. Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II, pengelolaan Perusahaan Listrik di Indonesia dilakukan sebagian oleh Jawatan Listrik dan Gas bersama Perusahaan Listrik Swasta Belanda.

- 4) Proses Nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia Dalam Periode 1951-1984 sebagai berikut:

- (a) Perusahaan Listrik Asing di Indonesia antara lain:
NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dikuasai Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik Negara di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen PUT.
- (b) Organisasi buruh SBLGI Non Vaksentral menuntut diadakannya nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa Belanda, maka Perusahaan Listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 November 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementerian PUT. Tahun 1958 DPR dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang- Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor P 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti Perusahaan Listrik Negara.
- (c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 67/1961 terbentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dan PUT Nomor 9/PRT/1964 BPU-PLN dibekukan.
- (d) Berdasarkan Peraturan Nomor 1/PRT/1965 BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Keputusan PUTL Nomor 1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang untuk merencanakan, membangun, dan mendistribusikan tenaga

listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi ke Departemen Pertambangan, sedangkan bidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Direktorat Jenderal ketenagaan diganti menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga Perusahaan Listrik Negara dapat memusatkan fungsinya yaitu pembinaan perusahaan kelistrikan pengembangan energi baru.

5) *Periode 1985 Sampai Sekarang*

- (a) Tenaga listrik penting untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, maka penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mengusahakan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya sebagai perintis usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dilaksanakan pihak swasta.
- (b) Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang perubahan status Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT. PLN (Persero) terhitung tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan yaitu orientasi pelanggan, orientasi pada perubahan serta menjadi perusahaan modern yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri, juga telah

disahkan Menteri Kehakiman Nomor C2-11.519 HT. 01.01 Tahun 1994 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Nomor 6731 Tahun 1994. PT.PLN (Persero) Cabang Situbondo merupakan cabang dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur yang membawahi Ranting Panarukan, Ranting Asembagus, Ranting Besuki, dan Ranting Bondowoso (mulai 1 Januari 1998). Saat ini PT.PLN Cabang Situbondo memiliki 140 pegawai dengan status pegawai tetap dan berlokasi di Jalan Cempaka Nomor 35 Situbondo.

2.2 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

2.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Pada PT.PLN (Persero), penggolongan bagian perusahaan berdasarkan fungsinya dan bentuk struktur organisasinya adalah garis dan staf. Kepala Cabang sebagai pimpinan tertinggi pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo membawahi 4 ranting, yaitu:

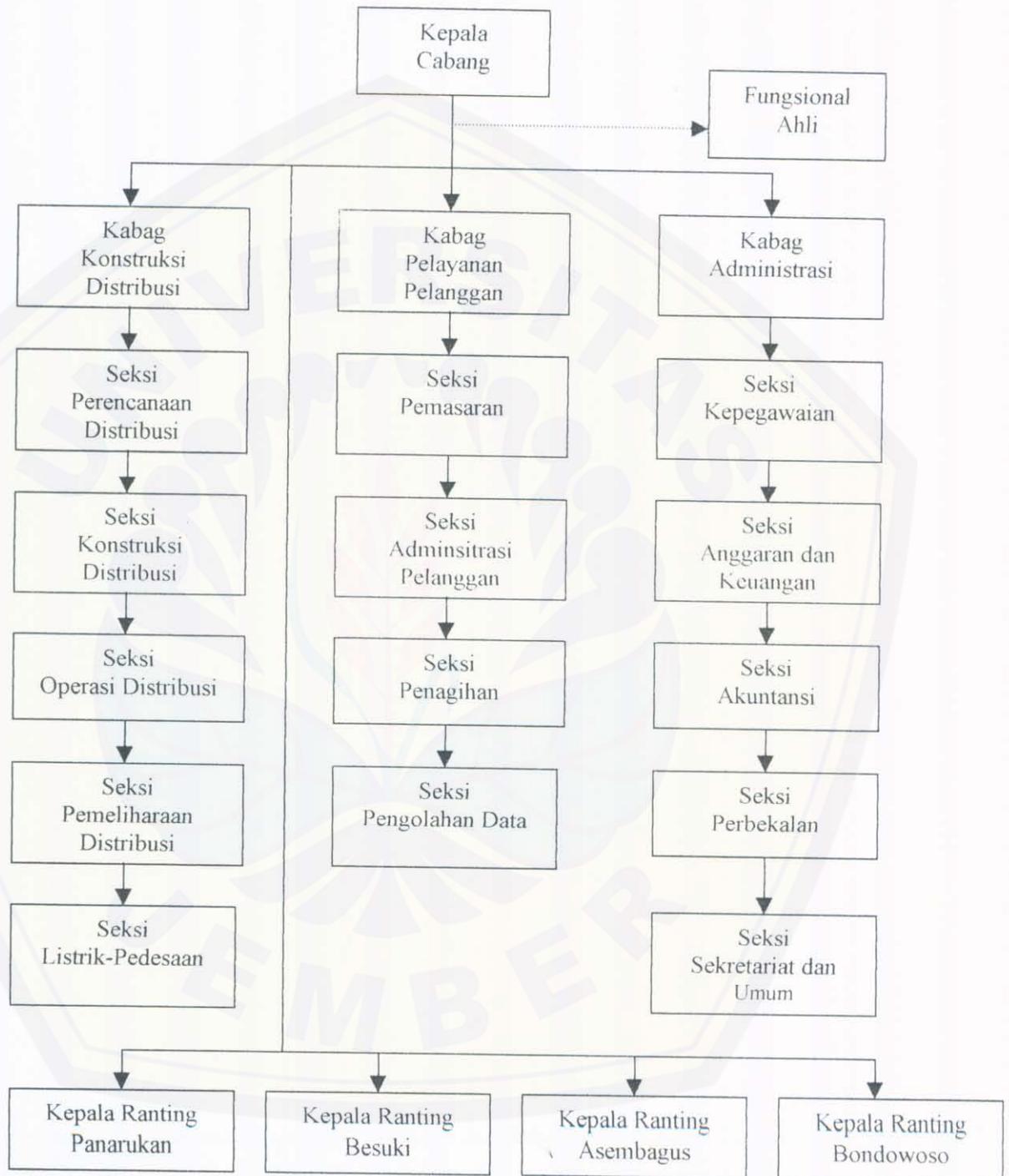
- 1) Ranting Panarukan
- 2) Ranting Asembagus
- 3) Ranting Besuki
- 4) Ranting Bondowoso

Serta membawahi 3 bagian dalam Cabang Situbondo, yaitu:

- 1) Bagian Konstruksi
- 2) Pelayanan Pelanggan
- 3) Administrasi

Tiap bagian bertanggung jawab atas seksi yang berada dibawahnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT.PLN (Persero) Cabang Situbondo dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.



Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab tiap bagian pada PT.PLN (Persero) Cabang Situbondo, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.2.1 Kepala Cabang

- 1) Merumuskan sasaran kerja cabang berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat, petunjuk serta kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
- 2) Menyusun konsep kebijakan teknis cabang berdasarkan program kerja unit perusahaan 5 induk sebagai bahan usulan.
- 3) Menganalisis dan mengevaluasi kinerja cabang dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
- 5) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, SPK, surat dinas lainnya yang menyangkut cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- 6) Menyusun usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) Cabang untuk ditindaklanjuti kepada Pimpinan Wilayah/Distribusi sebagai bahan rencana pelaksanaan tahun yang akan datang.
- 7) Mengendalikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan jadwal dan penanganan pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut kWh teknis maupun non teknis
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta bangunan sarana dan pendistribusian pembangkit tenaga listrik.

- 9) Mengkoordinasikan pelayanan dan pembangunan dengan Pemda / Instansi terkait.
- 10) Merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk menghindari penyimpangan.
- 11) Memeriksa secara uji mendadak terhadap bukti pengiriman uang penjualan rekening ke bank penerima PLN Pusat serta mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen besar untuk kebenaran pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12) Mengarahkan dan membina para rekanan cabang yang bergerak di bidang kelistrikan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan, serta penanganan gangguan memenuhi standart mutu pekerjaan yang sudah ditetapkan.
- 13) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya.

2.2.2.2 Fungsional Ahli

Memberikan layanan dan nasehat kepada kepala di bidang keahlian staf yang bersangkutan.

2.2.2.3 Kepala Bagian Konstruksi Distribusi

- 1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga listrik serta pembangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.
- 2) Penyusunan rencana teknis konstruksi operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.

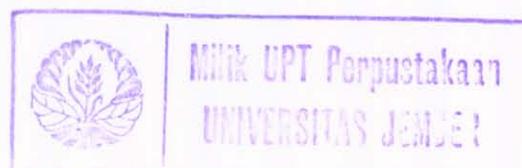
- 4) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- 5) Pengendalian pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- 6) Penyusunan usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Invest (UAI) khusus bagian distribusi dan konstruksi.
- 7) Memberi petunjuk kepada kepala seksi di bagian distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8) Membuat laporan berkala sesuai bidang distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Kontruksi dan Distribusi

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait untuk pelaksanaannya, memberi petunjuk bawahannya, mengkoordinasi pelaksanaan survey lokasi perolehan pembebasan tanah untuk pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik, menyusun usulan RAO dan UAI khusus distribusi dan konstruksi.

Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Mengatur dan mengerahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pengoperasian, pemeliharaan, penyusunan RAO/UAI dan pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target/sasaran yang telah ditetapkan, membuat laporan berkala sesuai bidangnya.



Kepala Seksi Operasi Distribusi

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan jaringan perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik, menyusun rencana kerja, membuat jadwal kegiatan seksi Operasi Distribusi untuk pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala sesuai bidangnya.

Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas membimbing bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program pemeliharaan distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, koordinasi dengan seksi terkait dalam pemeliharaan distribusi untuk keadaan suplay listrik, mengevaluasi data dari operasi jaringan untuk bahan pemeliharaan distribusi.

Kepala Seksi Listrik Pedesaan

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan listrik pedesaan yang dikoordinasi dengan pihak ketiga, memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target desa yang harus dilistriki, menerapkan strategi listrik pedesaan, membuat laporan berkala.

Kepala Seksi Penerangan

Mengawasi, memberi petunjuk, membagi tugas kepada teknisi penerangan dan juru administrasi penerangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penerangan sehingga sasaran penerangan dapat

tercapai, mengawasi pemakaian tarif segel yang dipakai untuk menghindari penyalahgunaan, koordinasi dengan pihak terkait, membuat laporan berkala.

2.2.2.4 Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

- 1) Melaksanakan penjualan tenaga listrik dan pengaminidrasian pelanggan tenaga listrik.
- 2) Penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik.
- 3) Penyusunan dan penerapan program penjualan tenaga listrik.
- 4) Mencatat jumlah pelanggan dan jenis tarif.
- 5) Penagihan rekening pemakaian tenaga listrik.
- 6) Pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan pelanggan.
- 7) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat/pelanggan.

Kepala Seksi Pemasaran

Melaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, penyuluhan dan survai pelanggan tenaga listrik di wilayah kerjanya, menyusun rencana penjualan tenaga listrik dan langkah pencapaiannya, perencanaan dan pembinaan sarana pembayaran rekening tenaga listrik (payment point) informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Kepala Seksi Pembacaan Meter

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pembacaan meter, aplikasi komputer dalam penyimpanan data, merencanakan, menyiapkan dan mengendalikan kegiatan pembacaan pencatatan dan perekam angka kedudukan meter alat pengukur meter pada tiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan sakelar waktu. Mengevaluasi kesalahan yang terjadi dan membuat laporan berkala.

Kepala Seksi Administrasi Pelanggan

- 1) Menyusun rencana kerja.
- 2) Melaksanakan pelayanan kepada calon pelanggan dan pelanggan tenaga listrik.
- 3) Memonitor keluhan pelanggan, memeriksa SJPS, PK, BA, Kwitansi, PDL, dan lain-lain.
- 4) Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi administrasi pelayanan pelanggan yang meliputi: pelayanan pada calon pelanggan, pencatatan jumlah pelanggan, jenis tarif dan golongan rekening guna kelancaran pelayanan.
- 5) Memberikan informasi mengenai penyaluran tenaga listrik.
- 6) Koordinasi dengan bagian lain.

Kepala Seksi Penagihan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penagihan meliputi penagihan dan pengisian / pengiriman rekening untuk pencapaian optimasi penagihan, memeriksa laporan hasil penagihan ranting untuk dievaluasi.

Kepala Seksi Pengolahan Data

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data yang meliputi aplikasi program pengolahandata, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sisitem informasi yang memadai.

2.2.2.5 Kepala Bagian Administrasi

- 1) Melaksanakan pengurusan kepegawaian, keuangan, pajak, asuransi, kesekretariatan, perbekalan, dan keamanan.
- 2) Perencanaan sumber daya manusia.
- 3) Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.

- 4) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.
- 5) Penyusunan anggaran belanja dan pendapatan satuan organisasi terkait.
- 6) Pengolahan data dan daur kas.
- 7) Pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- 8) Perencanaan kebutuhan sarana tenaga kerja.

Kepala Seksi Kepegawaian

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan pegawai, dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Kepala Seksi Anggaran Keuangan

Penyiapan rencana kerja dan anggarannya, pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang, pengolahan dana dan daur kas, pengasuransian harta kekayaan perusahaan, pencatatan pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Akuntansi

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan serta pembuatan laporan pembuatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Perbekalan

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang perbekalan yang meliputi rencana pengadaan barang peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum

Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja.

2.2.2.6 Kepala Ranting

- 1) Merumuskan sasaran kerja ranting sesuai kebijakan cabang sebagai pedoman kerja.
- 2) Mengatur, mengarahkan bawahan dalam rangka membina dan memotivasi bawahan.
- 3) Mengawasi dan mengkoordinasikan pengoperasian dan pemeliharaan sarana penyediaan tenaga listrik sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pelanggan antara target kWh terjual dan jumlah sambungan terpasang dapat tercapai.
- 5) Memeriksa dan menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran uang, surat PK dan surat lain yang dilaksanakan ranting.
- 6) Memeriksa dan meneliti bukti pengiriman uang ke bank penerima PLN cabang hasil penerimaan penjualan rekening, mengecek hasil pencatatan stand meter pelanggan besar dalam rangka meneliti kebenaran.
- 7) Evaluasi pelaksanaan tugas seksi apa sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 8) Memberinarahan dan pembinaan para rekanan ranting dalam bidang kelistrikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan maupun mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan PLN.
- 9) Merencanakan system pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dan penyerahan pekerjaan untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan merugikan PLN.

- 10) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala cabang.

2.3 Personalia Perusahaan

2.3.1 Jam Kerja

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo menerapkan 5 hari kerja efektif kecuali piket, dengan jam kerja untuk hari senin 8 jam dan untuk hari jum'at 7,5 jam. Untuk lebih jelasnya jam kerja PT.PLN (Persero) Cabang Situbondo dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Jam Kerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1	2	3
Senin –Kamis	07.30 – 16.00	12.00 – 12.30
Jum'at	07.30 – 16.00	11.30 –13.00
Untuk pengaduan Gangguan dilayani 24Jam		
Sabtu libur kecuali piket		

Sumber Data: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, Februari 2001.

2.3.2 Jumlah Pegawai

Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan, begitu juga halnya dengan PT.PLN (Persero) Cabang Situbondo. Tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya tenaga kerja yang handal dan betul-betul ahli dibidangnya. Dilingkungan kerja PT.PLN (Persero) Cabang Situbondo terdapat 140 tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Komposisi Jumlah Pegawai di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

NO.	BAGIAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	Kepala Cabang	1 Orang	S1 Elektro
2	Fungsional Ahli	2 Orang	SMEA
3	Kepala Bagian Konstruksi Distribusi	1 Orang	D3 Elektro
4	Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan	1 Orang	STM Elektro
5	Kepala Bagian Administrasi	1 Orang	D3 Akuntansi
6	Sekretaris Kepala Cabang	1 Orang	SMU IPS
7	Sie. Kontruksi Distribusi	4 Orang	STM Elektro
8	Sie. Perencanaan Distribusi	3 Orang	D3 Elektro
9	Sie. Operasi Distribusi	3 Orang	STM Elektro
10	Sie. Pemeliharaan Distribusi	5 Orang	STM Elektro
11	Sie. Listrik Pedesaan	1 Orang	STM Sipil
12	Sie. Penerangan	3 Orang	D3 Elektro
13	Sie. Pemasaran	1 Orang	STM Mesin
14	Sie. Administrasi Pelanggan	2 Orang	SMEA
15	Sie. Penagihan	1 Orang	SMEA
16	Sie. Pengolahan Data	4 Orang	STM Listrik
17	Sie. Pembacaan Meter	1 Orang	D3 Informatika
18	Sie. Kepegawaian	4 Orang	SMU IPS
19	Sie. Anggaran Keuangan	2 Orang	SMEA
20	Sie. Akuntansi	4 Orang	SMEA
21	Sie. Pembekalan	4 Orang	SMA IPS
22	Sie. Sekretariat dan Umum	6 Orang	STM Mesin
23	Sie. PUKK	2 Orang	STM Mesin

1	2	3	4
24	Sie. Pembangkitan PLTM	5 Orang	STM Mesin
25	Gardu Induk 2	4 Orang	STM Mesin
26	Ranting Besuki	9 Orang	D3 Akuntansi
27	Ranting Asembagus	8 Orang	SMEA
28	Ranting Panarukan	8 Orang	SMEA
29	Ranting Bondowoso	16 Orang	STM Elektro
30	Kantor Jaga	2 Orang	
	JUMLAH	140 Orang	

Sumber Data: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, Februari 2001

2.4 Kegiatan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan. Dalam lingkungan kerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo terdapat beberapa ranting, yaitu Ranting Besuki, Ranting Panarukan, Ranting Asembagus, dan Ranting Bondowoso. Seperti yang kita tahu bahwa listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo berusaha seoptimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan. Untuk mencapai hasil atau pelayan yang optimal dilakukan spesialisasi kerja di lingkungan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Yang dimaksud spesialisasi kerja disini adalah pembagian kerja menjadi beberapa bidang yang kemudian dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang ahli dibidang masing-masing. Dengan pelayanan yang optimal kepada para pelanggan diharapkan akan memberikan keuntungan

yang nantinya dapat menunjang pengembangan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Dalam struktur organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo terdapat 3 bagian yang mempunyai peranan tersendiri dalam lingkungan kerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Bagian- bagian itu antara lain:

1) Bagian Pelayanan Pelanggan

Kegiatan bagian Administrasi Pelayanan Pelanggan, yaitu melayani:

- (a) Permintaan sambungan baru.
- (b) Perubahan golongan tarif
- (c) Perubahan Daya
- (d) Perubahan nama pelanggan
- (e) Penyambungan sementara
- (f) Pengaduan
- (g) Pembayaran rekening
- (h) Memberikan informasi

2) Bagian Konstruksi Distribusi

Kegiatan Bagian Kontruksi Distribusi, yaitu meliputi:

- (a) Membuat perencanaan sarana penyediaan tenaga listrik
- (b) Melaksanakan operasi pendistribusian
- (c) Melaksanakan pemeliharaan pendistribusian
- (d) Membuat rencana konstruksi
- (e) Melaksanakan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah
- (f) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.

3) Bagian Administrasi

Kegiatan Bagian Administrasi, yaitu meliputi:

- (a) Melaksanakan pengurusan kepegawaian.

- (b) Melaksanakan pengurusan anggaran dan keuangan.
- (c) Melaksanakan pengurusan perbekalan dan keamanan.
- (d) Melaksanakan tata usaha penggajian dan pengupahan.
- (e) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan pegawai termasuk masalah kesehatan.
- (f) Pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 1 Huruf a tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo layak dikenakan pajak. Oleh karena itu PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo harus melaksanakan beberapa kewajiban, diantaranya:

- (a) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pakok Wajib Pajak.
- (b) Mengisi ,menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan.
- (c) Wajib menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskriptif Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan Praktek kerja Nyata adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Sedangkan untuk lokasi Praktek Kerja Nyata mahasiswa dapat menentukan sendiri tempatnya.

Penulis mendapatkan lokasi Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, namun sebelumnya harus melalui beberapa prosedur, antara lain:

- 1) Menyerahkan Surat Pengantar dari Diploma III Perpajakan untuk PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.
- 2) Kemudian PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo mengirimkan Surat Balasan yang berisi tentang diterimanya kami Praktek di Perusahaan tersebut.
- 3) Setelah diterima Surat Balasan dari pihak perusahaan, Diploma III Perpajakan menyerahkan Surat Tugas kepada Mahasiswa untuk diserahkan pada pihak perusahaan.
- 4) Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dimulai diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- 1) Pada minggu pertama, tepatnya hari pertama tanggal 19 Februari 2001 dilaksanakan perkenalan dengan para karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Kemudian ditempatkan di Bagian Keuangan karena dibagian ini Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan.

- 2) Pada minggu kedua, penulis mulai mengumpulkan data dan informasi melalui 2 cara:
 - (a) Dengan melihat data-data tertulis mengenai pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.
 - (b) Melalui wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Karyawan tersebut yaitu Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan dan Juru Utama Keuangan.
- 3) Pada minggu ketiga, penulis mempelajari cara penghitungan rekening listrik dari petugas yang menguasai tata cara penghitungan rekening listrik beserta pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya.
- 4) Pada minggu keempat, penulis mulai menyusun data dan informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3: Kegiatan Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.

KEGIATAN	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV
1	2	3	4	5
Perkenalan dengan para karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.	X			
Penempatan di Bagian keuangan	X			
Pengumpulan data dan informasi		X		

1	2	3	4	5
Mempelajari cara penghitungan rekening listrik beserta cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya.			X	
Menyusun data dan informasi untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan.				X

Selama pelaksanaan magang yang dimulai pada tanggal 19 Februari sampai dengan 19 Maret 2001 di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, penulis mendapatkan data dan informasi yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih untuk penyusunan laporan. Dari data atau informasi yang didapat dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo baik didapat dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara dengan karyawan PT.PLN (persero) Cabang Situbondo dapat diketahui bahwa selain pelayanan terhadap pelanggan dalam bidang kelistrikan, PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dikenakan pajak, dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai.

Pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dipotong atau dipungut ada 2 jenis, yaitu:

- 3.1.1 Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri.
- 3.1.2 Pajak Pertambahan Nilai Atas Rekening Tarif R3.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3.1.1 Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sama dengan pengertian Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2000 Pasal 4 yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan terhadap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta ekspor dan impor Barang Kena Pajak.

Namun Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo hanya dikenakan atas kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Kegiatan-kegiatan yang ada di PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo yang dapat dipungut Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 4 diantaranya adalah:

- (a) Pekerjaan jasa keamanan oleh Koperasi Karyawan "LISNA".
- (b) Pekerjaan jasa cleaning service oleh Koperasi Karyawan "LISNA".
- (c) Obat-obatan pegawai dan keluarga oleh Apotik yang ditunjuk oleh pihak PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo
- (d) Administrasi teknik, pengemudi, dan optel.
- (e) Pembacaan KWH meter .
- (f) Sewa beli komputer.

Rekanan yang melakukan kerjasama dengan PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, antara lain:

- (a) Koperasi Karyawan "LISNA"
- (b) Apotik Diponegoro

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran, harga jual, atau penggantian (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 huruf 17).

Namun jika dalam jumlah pembayaran, harga jual atau penggantian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka Dasar Pengenaan Pajaknya adalah $100/110 \times$ Jumlah pembayaran, harga jual atau penggantian.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat 1).

Namun jika dalam jumlah pembayaran ,harga jual atau penggantian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka Tarif Pajak Pertambahan Nilainya adalah $10\% \times 100/110 = 10/110$.

Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut adalah Tarif X Dasar Pengenaan Pajak (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1).

Contoh:

Biaya pekerjaan jasa keamanan bulan Juni sampai dengan Oktober 2000 oleh Koperasi Karyawan "LISNA", dengan perincian:

Kwitansi tagihan Juni sampai dengan Oktober 2000	Rp18.202.800
PPN: $10/110 \times \text{Rp } 18.202.800$	(Rp 1.654.800)

Jumlah	Rp 16.548.000

Biaya pekerjaan cleaning service bulan Juni sampai dengan Oktober 2000 oleh Koperasi Karyawan "LISNA", dengan perincian:

Kwitansi tagihan Juni sampai dengan Oktober 2000	Rp 21.710.000
PPN: $10/110 \times \text{Rp } 21.710.000$	(Rp 1.973.636)

Jumlah	Rp 19.736.364

Cara Pemungutan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilunasi atau dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tagihan atas penggunaan jasa. Jadi dalam pembayaran sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pembayaran atas jasa tersebut dibuat bukti pembayaran yang didalamnya tercantum:

- (a) Jumlah yang harus dibayarkan.

- (b) Dasar Pengenaan Pajak.
- (c) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai.

Pada bukti pembayaran dilampirkan Surat Kontrak Kerjasama dengan pihak rekanan, Kwitansi Pembayaran yang telah dilengkapi materai, dan Faktur Pajak.

Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Mei 1984 Nomor 432/ KMK.04/ 1984 bahwa Faktur Pajak dapat dibuat selambat-lambatnya 10 hari sesudah penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau setelah saat pembayaran, jika pembayaran dilakukan lebih dari penyerahan.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- (a) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- (b) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- (c) Jenis barang dan jasa, jumlah harga jual dan penggantian, dan potongan harga.
- (d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- (e) Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan faktur.
- (f) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dimasukkan kedalam bukti pemotongan dengan mencantumkan:

- (a) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut.
- (b) Jumlah Faktur Pajak yang dilampirkan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke BNI Cabang Situbondo oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah bulan penerimaan pembayaran.

3.1.2 Pajak Pertambahan Nilai Atas Rekening Tarif R3

Sebelum membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rekening Tarif R3, ada baiknya kita mengetahui pengertian Penagihan Rekening Listrik. Pengertian Penagihan Rekening Listrik

Dalam Tarif Umum Listrik (TUL) PLN (1998:1), Penagihan adalah kegiatan untuk melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lainnya/rupee-rupee).

Definisi dari Rekening Listrik itu sendiri adalah perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik dan tagihan-tagihan lain yang berhubungan dengan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan dan setelah dilunasi merupakan bukti pembayaran.

Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk semua keperluan dan bukan listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat.

Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik yaitu setiap orang atau badan usaha/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instansi PLN.

Dari beberapa pengertian diatas Penagihan Rekening Listrik adalah kegiatan penagihan piutang pelanggan listrik atas pemakai daya dan energi listrik serta tagihan-tagihan lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan kepada PLN melalui loket-loket pembayaran yang telah ditentukan.

Besarnya tagihan tergantung dari besarnya pemakaian energi listrik yang telah dikalkulasikan dalam rupiah berdasarkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku serta biaya beban yang telah ditentukan. Untuk mengetahui beberapa Tarif Dasar Listrik, perhatikan tabel 4 berikut:

Tabel 4: Tarif Dasar Listrik Tahun 2000

NO URUT	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA
1	2	3
1	S-1/TR	220 VA
2	S-2/TR	250 VA s/d 200 kVA
3	S-3/TM	Diatas 200 kVA
4	R-1/TR	250 VA s/d 2200 VA
5	R-2/TR	Diatas 2200 VA s/d 6600 VA
6	R-3/TR	Diatas 6600 VA
7	B-1/TR	250 Va s/d 2200 VA
8	B-2/TR	Diatas 2200 VA s/d 200 kVA
9	B-3/TM	Diatas 200 kVA
10	I-1/TR	450 VA s/d 14 kVA
11	I-2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA
12	I-3/TM	Diatas 200 kVA
13	I-4/TT	30.000 kVA keatas
14	P-1/TR	250 VA s/d 200 kVA
15	P-2/TM	Diatas 200 kVA
16	P-3/TR	
17	M/TR, TM, TT	

Sumber Data: Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Tarif Dasar Listrik

Catatan:

TR = Tegangan Rendah

TM = Tegangan Menengah

TT = tegangan tinggi

Dari beberapa macam Tarif Dasar Listrik (TDL) diatas, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo adalah Tarif R-3.

Pengertian Tarif R-3

Yang dimaksud dengan Tarif R-3 menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 Tanggal 31 Maret 2000 adalah tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah) dengan batas daya diatas 6600 VA.

Dasar Pengenaan Pajak atas Rekening Tarif R-3

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan listrik tersebut adalah jumlah biaya beban dan tambahan beban ditambah dengan biaya pemakaian listrik.

(Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ.51/1995 Tanggal 18 Agustus 1995)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas rekening Tarif R-3 adalah 10% (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat 1).

Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1).

Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Rekening tarif R-3 Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ.51/1995 Tanggal 18 Agustus 1995

Pajak pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan listrik kepada pelanggan dibayar oleh pelanggan bersamaan dengan pembayaran tagihan atas penyerahan listrik, yang pelaksanaannya dimulai sejak tagihan rekening bulan Oktober 1995 yang pembayarannya dilakukan bulan November 1995.

Dengan demikian atas rekening atau tanda pembayaran dalam bentuk apapun dari bulan-bulan sebelumnya tidak terutang pajak Pertambahan nilai. Rekening listrik atau tanda pembayaran dalam bentuk apapun yang diterbitkan oleh PT.PLN (Persero) yang didalamnya sudah tercantum Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dinyatakan sebagai Faktur Pajak Sederhana.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Rekening Tarif R-3

Pajak Pertambahan Nilai atas Rekening tarif R-3 disetorkan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke BNI Cabang Situbondo selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan penerimaan pembayaran rekening listrik.

Penyerahan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai atas Rekening Tarif R-3

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo menyerahkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan penerimaan pembayaran rekening listrik.

Cara Penghitungan Rekening Listrik

Besarnya tagihan rekening listrik dipengaruhi oleh unsur-unsur, yaitu:

1. Biaya Beban

Biaya Beban adalah biaya yang harus dibayar pelanggan setiap bulan dan besarnya tidak berubah sesuai dengan daya listrik (VA) yang terpasang di setiap rumah.

Berikut ini besarnya Biaya Beban per kVA.

Tabel 5: Biaya Beban Berdasarkan Tarif Dasar Listrik Tahun 2000

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)
1	2	3	4
1	S-1/TR	S/d 220 VA	*)
2	S-2/TR	250 VA s/d 900 VA	3.874,00
		Diatas 900 VA s/d 2200 VA	11.000,00
		Diatas 2200 VA s/d 200 kVA	14.000,00
3	S-3/TM	Diatas 200 kVA	15.500,00
4	R-1/TR	250 VA s/d 450/500 VA	4.589,00
		Diatas 500 VA s/d 900 VA	4.635,00
		Diatas 900 VA s/d 2.200VA	11.500,00
5	R-2/TR	Diatas 2.200 VA s/d 6600 VA	17.000,00
6	R-3/TR	Diatas 6.600 VA	26.800,00
7	B-1/TR	250 VA s/d 900 VA	16.500,00
		Diatas 900 VA s/d 2.200VA	16.500,00
8	B-2/TR	Diatas 2.200 VA s/d 200 kVA	19.000,00
9	B-3/TM	Diatas 200 kVA	16.500,00
10	I-1/TR	450 VA s/d 900 VA	17.000,00
		Diatas 900 VA s/d 14 kVA	17.000,00
11	I-2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA	18.000,00
12	I-3/TM	Diatas 200 kVA	16.000,00
13	I-4/TT	30.000 kVA keatas	15.500,00
14	P-1/TR	250 VA s/d 200 kVA	17.000,00

1	2	3	4
15	P-2/TM	Diatas 200 kVA	16.000,00
16	P-3/TT		
17	M		

Sumber Data: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000.

Untuk golongan Tarif S-1 biaya tidak didasarkan pada Rp/kVA tetapi berdasarkan harga langganan perbulan sebesar Rp. 7.782,00 sedangkan untuk golongan Tarif P-3 tidak dikenakan biaya beban karena merupakan tanggungan pemerintah dan untuk golongan Tarif M tidak dikenakan biaya beban karena termasuk Tarif Multiguna yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus, misalnya pembelian energi listrik oleh PT.Semen Gresik.

Untuk golongan Tarif R-1 dengan batas daya 450 VA biaya beban per kVA per bulan sebesar Rp.4.589, dan batas daya 900 VA sampai dengan 2200 VA biaya beban per kVA per bulan sebesar Rp. 11.500.

2. Golongan Tarif dan Biaya Pemakaian

Golongan Tarif merupakan dasar perhitungan yang diatur dalam Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berisikan ketentuan harga jual dan golongan Tarif Tenaga PLN.

Biaya Pemakaian adalah biaya yang dibayar untuk jumlah KWH yang dipakai dalam suatu bulan tertentu. Besarnya biaya pemakaian tenaga listrik per bulan dapat berbeda, tergantung dari golongan tarif dan banyaknya pemakaian sebagaimana yang ditunjukkan oleh besarnya KWH sesuai dengan pencatatan meter KWH dan pencatatan pada kartu meter langganan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6: Biaya Pemakaian Berdasarkan Tarif Dasar Listrik Tahun 2000

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA (Rp/kWh)	PEMAKAIAN
1	2	3	4	
1	S-1/TR	S/d 220 VA		
2	S-2/TR	250 VA s/d 900 VA	64,56	
		Diatas 900 VA s/d 2.200 VA	20 kWh pertama	
			90,00	
			40 kWh berikutnya	
			129,00	
			KWh selanjutnya	
			175,00	
		Diatas 2.200 VA s/d 200 kVA	60 jam nyala/bulan	
			154,00	
			Selebihnya	
			160,00	
3	S-3/TM	Diatas 200 kVA	WBP Sosial murni = $K \times F$	
			123,00	
			WBP Komersial = $K \times F$	
			123,00	
			LWBP Sosial Murni = $F \times$	
			123,00	
			LWBP Komersial = $F \times$	
			123,00	

1	2	3	4
4	R-1/TR	250 VA s/d 450/500 VA	60 jam nyala/bulan
			93,40
			Selebihnya 126,20
		Diatas 500 VA s/d 900 VA	60 jam nyala/bulan
			111,30
			Selebihnya 169,50
		Diatas 900 VA s/d 2.200 VA	20 kWh pertama
			205,00
			40 kWh berikutnya
			210,00
			KWh selanjutnya
			215,00
5	R-2/TR	Diatas 2.200 VA s/d 6.600 VA	
			333,20
6	R-3/TR	Diatas 6.600 VA	
			460,00
7	B-1/TR	250 VA s/d 900 VA	120 jam lainnya
			201,00
			Selebihnya 172,50
		Diatas 900 VA s/d 2.200 VA	120 jam nyala/bulan
			285,00
			Selebihnya 286,00
8	B-2/TR	Diatas 2.200 VA s/d 200 kVA	100 jam nyala/bulan
			290,00

1	2	3	4
			Selebihnya 295,00
9	B-3/TM	Diatas 200 kVA	WBP = K x 262,40
			LWBP 262,40
10	I-1/TR	450 VA s/d 900 VA	80 jam nyala/bulan 119,50
			Selebihnya 116,50
		Diatas 900 VA s/d 14 kVA	80 jam nyala/ bulan 235,00
			Selebihnya 240,00
11	I-2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA	WBP = K x 228,00
			LWBP 228,00
12	I-3/TR	Diatas 200 kVA	WBP < 350 JAM = K x 263,20
			> 350 jam 263,20
			LWBP 263,20
13	I-4/TT	30.000kVA keatas	273,30

1	2	3	4
14	P-1/TR	250 VA s/d 200kVA	WBP = K x 489,00
15	P-2/TM	Diatas 200 kVA	LWBP 285,30
			285,30
16	P-3/TR		493,00
17	M (multiguna)		900,00

Sumber Data: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor.48 Tahun 2000.

Contoh penghitungan rekening Tarif R-3 beserta pemungutan Pajak Pertambahan Nilainya:

- 1) Rekening bulan November 2000 dengan periode bayar 1 sampai dengan 20 Desember 2000.

Angka kedudukan meter:

Akhir = 16.543 kWh Lalu = 16391 kWh

Pemakaian (kWh/kVArh)

= 16543 kWh – 16391 kWh

= 152 kWh

Biaya Pemakaian = Rp. 460,00

Biaya Beban = Rp. 26.800,00

Maka jumlah tagihan:

Biaya Beban = $\frac{6600 \text{ VA}}{1000} \times \text{Rp.}26.800,00 = \text{Rp.} 176.880,00$

Biaya Pemakaian = 152 kWh X Rp. 460,00 = Rp.	69.920,00
Sub Jumlah	Rp. 246.800,00
PPJ 7%	Rp. 17.276,00
PPN 10 %	Rp. 26.408,00
Jumlah Tagihan	Rp. 290.484,00

2) Rekening bulan Desember 2000 dengan periode bayar 1 sampai dengan 20 Januari 2001:

Angka kedudukan meter:

Akhir = 16837 kWh Lalu = 16543 kWh

Pemakaian (kWh/kVArh)

= 16837 kWh – 16543 kWh

= 297 kWh

Biaya Pemakaian = Rp. 460,00

Biaya Beban = Rp. 26.800,00

Maka Jumlah Tagihan:

Biaya Beban = $\frac{6600 \text{ VA}}{1000} \times \text{Rp. } 26.800,00 = \text{Rp. } 176.880,00$

Biaya Pemakaian = 297 kWh X Rp. 460,00 = Rp. 136.620,00

Sub Jumlah Rp. 313.500,00

PPJ 7% Rp. 21.945,00

PPN 10% Rp. 33.545,00

Jumlah Tagihan Rp. 368.990,00

Loket tempat pembayaran rekening listrik dapat melalui loket-loket yang telah ditunjuk oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo:

- Loket pada kantor PLN.
- Bank-bank.
- Koperasi/KUD.
- Organisasi Karang Taruna.

(e) Kantor Desa.

Masalah dan Asumsi

1) Masalah

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo sering menghadapi kendala dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu kendala itu adalah keterlambatan pelanggan dalam membayar rekening listriknya. Mengapa keterlambatan pelanggan dalam pembayaran rekening listrik menjadi penyebab terhambatnya pemungutan Pajak pertambahan Nilai? Sebab dengan terlambatnya pelanggan dalam membayar rekening listrik, otomatis juga akan menghambat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang langsung dipungut pada saat pembayaran rekening listrik. Jika pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhambat maka penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke BNI Cabang Situbondo tidak akan tepat pada waktunya. Sehingga besar kemungkinan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo akan dikenakan denda oleh Kantor Pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2) Asumsi

Keterlambatan pelanggan dalam pembayaran rekening listrik dapat diatasi dengan diberlakukannya sanksi. Sanksi atas keterlambatan pembayaran rekening listrik, yaitu:

- (1) PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo berhak melaksanakan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik pada pelanggan apabila pelanggan belum melunasi pembayaran rekening listrik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.
- (2) Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan golongan tarif untuk setiap bulan keterlambatan.

- (3) Penyambungan kembali akan dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening listrik ditambah biaya keterlambatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum juga melunasi pembayaran rekening listriknya maka PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo berhak melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo. Permintaan penyambungan kembali diperlakukan sebagai permintaan penyambungan baru dan peminta tenaga listrik wajib melunasi tunggakan dan tagihan susulan.

Tabel 7: Biaya Keterlambatan Tarif Dasar Listrik Tahun 2000

GOLONGAN TARIF	BIAYA KETERLAMBATAN (Rp.)
1	2
S-1, S-2, R-1, B-1, dan I-1	Rp. 3000,00
R-2, R-3, B-2, I-2, P-1, dan P-3	Rp. 25000,00
S-3, B-3, I-3, I-4, dan P-2	3% dari jumlah pembayaran untuk rekening bulan yang bersangkutan.

Sumber Data: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 66.k/010/DIR/2000

Pengenaan biaya keterlambatan untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3X tarif biaya keterlambatan (BK).

Contoh pengenaan biaya keterlambatan:

Rekening bulan (N) yang dibuat dengan pola B siklis satu gelombang.

Bulan rekening: November 2000

Bulan penagihan: Desember 2000

Periode tanggal bayar 1 sampai dengan 20 Desember 2000

Dilunasi tanggal 1 s/d 20 Desember 2000, *tidak dikenakan BK*

Dilunasi tanggal 21 s/d 31 Desember 2000, dikenakan BK Pertama Rp.25.000

Dilunasi tanggal 1 s/d 31 Januari 2001, dikenakan BK Kedua Rp. 50.000

Dilunasi tanggal 1 s/d 28 Februari 2001, dikenakan BK Ketiga Rp. 75000

Bulan rekening: Maret 2001 Bulan penagihan: April 2001

Periode tanggal bayar 1 sampai dengan 20 April 2001

Dilunasi tanggal 1 s/d 20 April 2001, tidak dikenakan BK

Dilunasi tanggal 21 s/d 30 April 2001, dikenakan BK Pertama Rp. 25.000

Dilunasi tanggal 1 s/d 31 Mei 2001, dikenakan BK Kedua Rp. 50.000

Dilunasi tanggal 1 s/d 30 Juni 2001, dikenakan BK Ketiga Rp. 75.000

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 8: Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

BULAN	JUMLAH PPN	PERSENTASE
1	2	3
Oktober	Rp. 5.599.529	10,6%
November	Rp. 3.628.436	6,9%
Desember	Rp.43.648.392	82,5%
	Rp.52.876.357	100%

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Berupa Pajak Pada triwulan IV Tahun 2000 PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Siitubondo

Pada bulan November terdapat penurunan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 3,7%, sedangkan pada bulan Desember terjadi kenaikan sebesar 75,6%.

Tabel 9: Pajak Pertambahan Nilai Atas Rekening Tarif R3

BULAN	JUMLAH PPN	PERSENTASE
1	2	3
Oktober	Rp. 643.675	31,1%
November	Rp. 733.700	35,5%
Desember	Rp. 689.665	33,4%
	Rp.2.066.040	100%

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Berupa Pajak Pada Triwulan IV Tahun 2000 PT.PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Pada bulan November terjadi kenaikan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 4,4%, sedangkan pada bulan Desember terjadi penurunan sebesar 2,1%.

Dari data-data dan informasi selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan baik itu kenaikan atau penurunan. Namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lain seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Masa, Penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak, terdapatnya faktur pajak dalam setiap kegiatan yang melibatkan rekanan dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB IV PENUTUP

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping minyak bumi gas alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu peraturan pajak perlu disesuaikan dengan falsafah pancasila, struktur organisasi pemerintah Republik Indonesia, dan juga disesuaikan dengan aspirasi rakyat Indonesia dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan Undang-Undang pajak yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Disamping itu Pajak Pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting karena meliputi seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya akan mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam Pajak Pertambahan Nilai, dari yang kaya sampai yang miskin.

Karena begitu besar dan pentingnya peranan Pajak Petambahan Nilai dalam kehidupan Bangsa Indonesia sehingga mendorong penulis untuk memilih tema tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penyusunan laporan tugas akhir. Melalui Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo penulis dapat mengetahui jenis Pajak Pertambahan Nilai yang ada di perusahaan tersebut.

Ada 2 jenis Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo, yaitu:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri
- (2) Pajak Pertambahan Nilai Atas Rekening Tarif R-3

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan tugas akhir ini pihak PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo dengan tulus membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Rasa syukur kehadiran Allah SWT ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan,dukungan, dan bimbingan selama ini sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan dapat berjalan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Prof.DR.Rochmat Sumitro, 2000, "Pajak Pertambahan Nilai", edisi revisi, penerbit PT. ERISCO.

Drs.Mardiasmo,MBA,Akt, 1998, "Perpajakan", penerbit Andi Yogyakarta.

, 2000, "Seri Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai", penerbit Sinar Grafika.

Cyrus Sihaloho, 1995, "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", Rajawali Pers Yogyakarta.

, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-41/PJ.51/1995 tanggal 18 Agustus 1995 tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas tarif P-3.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
2. Daftar Hadir selama Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Konsultasi/Bimbingan laporan tugas akhir
5. Bukti Pembayaran untuk bulan November 2000
6. Faktur Pajak Standar bulan November 2000
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak November 2000
8. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk masa pajak November 2000
9. Laporan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh badan untuk bulan November 2000
10. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Berupa Pajak pada triwulan IV tahun 2000 (Oktober, November, Desember)



Surat Tugas

Nomer : 517/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Nur Arifiyah	98 - 1001	Ketua
02	Evi Yoritasanti	98 - 1026	Wakil ketua
03	Dyah Pramudya	98 - 1972	Anggota
04	Wahyu Novita	98 - 1004	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT Perusahaan Listrik Negara Situbondo selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 FEB 2001

Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG SITUBONDO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 32 /492/STB/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. RUSBANDI
Nomor Induk : 5485008-J
Jabatan : KEPALA PT. PLN (PERSERO) CABANG
SITUBONDO

Dengan ini menerangkan :

Nama : NUR ARIFIYAH
Jurusan / Prody : PERPAJAKAN
Lembaga Pendidikan : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 19 Pebruari 2001 s/d 19 Maret 2001.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Situbondo, 13 Maret 2001



I. RUSBANDI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN/PARIWISATA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : NUR ARIFIYAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 980903101001
 Alamat Mahasiswa : JL. JAWA VI NO.2B JEMBER
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : DIII PERPAJAKAN
 Judul Laporan Akhir : PENERAPAN PAJAK PERTAMALAHAN NILAI
 DI PT. PLN(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA
 TIMUR CABANG BITUBONDO
 Dosen Pembimbing : Drs. BOEDIJONO, MSi
 Asisten Pembimbing :

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	KEMIS/5-4-2007	108.300	PENAMBAHAN DATA	B
2.	SELASA/17	08.30	PERBAIKAN PENULISAN	P- B
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass.Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG - SITUBONDO

XI/2000

BUKTI PEMBAYARAN

Terima dari PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo uang sebanyak Rupiah

DUA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS

TERBILANG

SEPULUH RIBU RUPIAH

Rp. 21.710.000,-

URAIAN

Kode Perkiraan

PEMBAYARAN :

Biaya pekerjaan Cleaning Service Bulan JUNI S/D OKTOBER 2000-

oleh Koperasi "LISNA" dengan rincian sbb :

Kwitansi tagihan JUNI S/D OKTO. 2000

PPN 10 % : 10 / 110 X Rp. 21.710.000,-

Rp. 21.710.000,-

Rp. 1.973.636,-

JUMLAH :

Rp. 19.736.364,-

menurut kwitansi terlampir.

BC 915.195 Re 30-11-2000

ode Pos Anggaran

Mengetahui

Sejalan dibayar

Situbondo,

Tanda tangan yang menyetujui

96/2T

Nama Jelas

Pemegang Kas

No. Faktur Penjualan / Kontrak / Order *) :	FAKTUR PAJAK STANDAR	Nomor Seri : CYJVJ - 627 - 000875		
PENGUSAHA KENA PAJAK :				
N a m a : KOPKAR LISNA SITUBONDO				
A l a m a t : Jln. Cempaka No. 35 Situbondo				
N P W P : 1 3 4 2 4 1 5 5 6 2 7				
No. Pengukuhan PKP : No. 627 00656.06.91 Tanggal : 24 Juni 1991				
Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) :				
PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :				
N a m a : PT. PLN (PERSERO) CAB. SITUBONDO				
A l a m a t : Jln. Cempaka No. 35 Situbondo				
N P W P : 1 0 0 1 6 2 9 3 6 2 7				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
1.	Tagihan Cleaning Service bulan Juni 2000 sesuai SP No. 11.1.Pj/ 060/SIB/2000 tanggal 2 Juni 2000.			4.342.000,00
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)				4.342.000,00
Dikurangi potongan harga				--
Dikurangi uang muka yang telah diterima				--
Dasar Pengenaan Pajak				3.947.273,00
PPN = 10 % x dasar Pengenaan Pajak -				394.727,00
Situbondo, 03 Nopember 2000				
Jatua II,				
TARIF	D P P	PPn. BM		
..... %	Rp.	Rp.		
..... %	Rp.	Rp.		
..... %	Rp.	Rp.		
..... %	Rp.	Rp.		
TOTAL		Rp.		

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)

FORMULIR

1195

Masa Pajak **NOPEMBER** 2000

Pembetulan Masa Pajak 19 Ke-

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP : Kode Cabang :
 2. NPPKP : Tanggal
 3. Nama PKP : PT. PLN CABANG SITUBONDO
 4. Alamat : Jl. Gempaka no. 35 Situbondo Kode Pos
 5. Nomor Telepon : (0338) 672904
 6. Merek Usaha : Nama Baru Alamat Baru No. Telepon Baru Jenis Usaha
 7. Ijin Sentralisasi : No. Tanggal
 8. Jenis Usaha : KLU

1	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan I/C	B.1.1.1			
	1.1.2. Tanpa I/C	B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		7.337.000,--	75.379.500,--
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3			
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		7.337.000,--	75.379.500,--
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6			
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		7.337.000,--	75.379.500,--
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1			
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2			
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3			
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		7.337.000,--	75.379.500,--

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	KODE TULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu $10\% \times$ (Kode B.1.3.4)	C.1.1		733.700,--	7.537.950,--
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
	1.3. Jumlah (1.1. + 1.2)	C.1.3		733.700,--	7.537.950,--
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2			
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		733.700,--	7.537.950,--
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1. SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1			
	4.1.2. SSP belum diterima	C.4.1.2			
	4.2. PPN yang disotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2			
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5			
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN				
	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
	1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
	1.5. Lain-lain	D.1.5			
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2			
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5			
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		733.700,--	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				

LEMBAR

1



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BANYUWANGI

(SURAT SETORAN PAJAK)

(SSP)

Untuk arsip WP

PWP : 1 - 001 - 629 - 3 - 627

diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO

Alamat WP : Jl. Cempaka no. 35

SITUBONDO

Kode Pos

Kode Jenis Pajak
(MAP)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

1 2 1

6 0 0

Setoran Pemungut

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Peri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt ~~Nov~~ Des

Peri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

2 0 0 0

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

Diisi dengan huruf

Tujuh ratus Tiga puluh Tiga ribu Tujuh -
ratus Rupiah ###

Rp. 733.700,--

Tempat Teraan

Diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

8 - 11 - 2000

CABANG PERSEPSI (Persis)
CABANG SITUBONDO

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dar. bangun
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama peny

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran - VII
SE. 46 / Pj. 3 / 1980
Tgl. 23 Desember 1980

KEPADA YTH,
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Kabupaten Banyuwangi
di.
BANYUWANGI.

LAPORAN PUNGUTAN PPN/ PPh. BM OLEH BADAN, BADAN TERTENTU
Bulan : NOPEMBER 2000

URAIAN (1)	Jumlah Faktur Pajak (terlampir) (2)	PPN/ PPh. BM yang dipungut	
		PPN (3)	PPh. BM (4)
Bulan ini	10 lembar	Rp. 3,628,436 ,--	Rp. Nihil ,--
s/d. Bulan sebelumnya	114 lembar	Rp. 81,390,718 ,--	Rp. Nihil ,--
Jumlah s/d. Bulan ini	124 lembar	Rp. 85,019,154 ,--	Rp. Nihil ,--

Catatan :

- Jumlah PPN yang tidak dipungut atas tagihan dibawah Rp. 500.000,- sebesar Rp. sesuai Faktur Pajak sebanyak lembar (terlampir)
- Jumlah PPN yang tidak dipungut karena sesama Badan pemungut sebesar Rp. sesuai Faktur Pajak sebanyak lembar (terlampir)

Situbondo, 19 Desember 2000
Pemotong Pajak

Nama : PT. PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO
NPWP : 1.001.629.3.627
Alamat : Jl. Cempaka no. 35 Situbondo.

BANYUWANGI



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG SITUBONDO

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BERUPA PAJAK
TRIWULAN : Ke IV Tahun 2000

APLN / APBN / LOAN / HIBAH *)	2	WAPU / PLN MEMUNGUT / MEMOTONG			WABA / PLN DIPUNGUT / DIPOTONG			JUMLAH (dalam Rp) 9 = (3 s.d 8)
		Bulan : OKT.'2000	Bulan : NOP.'2000	Bulan : DES.'2000	Bulan : OKT.'2000	Bulan : NOP.'2000	Bulan : DES.'2000	
1								
I	Pajak Penghasilan : 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 Impor 3. PPh Pasal 22 BBM 4. PPh Pasal 23 5. PPh Pasal 26 6. PPh Bunga Jasa Giro / Bunga Deposito 7. PPh Jasa Konstruksi / Konsultan 8. Fiskal Luar Negeri 9. PPh atas tanah / bangunan 10. PPh Lainnya / Pensiunan	9,350,739 - - - - - - - - -	12,417,836 - - - - - - - - -	18,422,517 - - - - - - - - -	- - - - - 70,350 - - - - -	- - - - - 24,640 - - - - -	- - - - - 15,310 - - - - -	40,191,092 - - - - - - - - - - -
II	Pajak Pertambahan Nilai & PPh BM : 1. PPN / PPh BM Dalam Negeri 2. PPN / PPh BM Impor 3. PPN Rekening Listrik R ₃ 4. PPN / PPh BM Lainnya	5,599,529 - - -	3,628,436 - - -	43,648,392 - - -	- - 642,675 -	- - 733,700 -	- - 589,665 -	52,876,357 - 2,066,040 -
III	Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan	-	-	-	-	-	-	-
IV	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	513,260	10,925	52,360	576,545
V	Bea Materai : 1. Bea Materai Rekening Listrik 2. Bea Materai Tempel 3. Bea Materai Teraan	2,865,000 - -	4,635,000 - -	3,003,000 - -	- -	5,000,000 -	5,000,000 -	20,503,000 -

